

BAB IV

DILEMA JEPANG SEBAGAI NEGARA INDUSTRI BERTEKNOLOGI MAJU

DALAM PENANGANAN ISU PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

(PROTOKOL KYOTO)

Dari hasil perhitungan emisi gas rumah kaca global oleh UNFCCC, Jepang merupakan negara dengan jumlah emisi sebanyak 1.173.360 juta ton.¹ Hal tersebut menempatkan Jepang sebagai salah satu dari 10 negara penghasil emisi terbesar dunia. Jepang sebagai negara industri telah menyumbangkan emisinya sejak perang dunia II, dimana Jepang memilih menitikberatkan pengembangan ekonominya pada industri teknologi. Hal tersebut dilakukan untuk membangun kembali ekonomi Jepang pasca perang.

Teknologi-teknologi Jepang yang kian hari semakin menyebar ke berbagai penjuru dunia dapat dirasakan karena industri teknologi Jepang yang semakin maju. Akan tetapi disamping kemajuan teknologi industri tersebut, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh Jepang yaitu masalah lingkungan. Industrialisasi merupakan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di Jepang. Kondisi lingkungan Jepang sangat buruk pada masa *high growth economy* yang diakibatkan oleh industrialisasi dan pembangunan ekonomi. Kerusakan lingkungan pada saat itu berasal dari beberapa sektor yang dominan seperti industri dan manufaktur.

¹ Sarah, I. P. (2013). *Perubahan Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Protokol Kyoto*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Hal 2.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Jepang pasca perang dan juga disertai dengan kerusakan lingkungan, menunjukkan bahwa Jepang memiliki catatan terburuk mengenai kerusakan lingkungan diantara negara-negara maju.² Hal tersebut dilakukan oleh Jepang tidak lain untuk meningkatkan perekonomian Jepang. Oleh karena itu Jepang memutuskan untuk mencari solusi dalam menangani masalah lingkungan yang dihadapi negaranya, sehingga Jepang tidak perlu khawatir akan anggapan miring dari negara-negara lainnya tentang keserakahan Jepang yang demi kemajuan negaranya rela mengorbankan alam sekitar yang dimana perlindungan terhadap alam sangat penting bagi kelanjutan kehidupan manusia.

Jepang berupaya ikut ambil andil dalam penanganan isu perubahan iklim global yakni Protokol Kyoto yang dibentuk oleh badan PBB yang menangani masalah lingkungan (UNFCCC). Namun dalam pelaksanaannya, upaya Jepang dalam Protokol Kyoto malah terlihat bimbang atau dilema. Hal tersebut dikarenakan aturan-aturan yang ada di Protokol Kyoto yang membuat Jepang ragu dalam mengimplementasikannya, diantaranya yaitu Jepang harus mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 6%, dan bagi Jepang aturan tersebut menjadi beban berat yang dapat mempengaruhi kebijakan Jepang. Hal tersebut dikarenakan berkomitmen dalam masalah lingkungan akan mengorbankan sebagian kepentingan ekonomi jangka panjang, sebab untuk melaksanakan target penurunan emisi secara otomatis Jepang memerlukan beberapa program-program pembaharuan seperti pembaharuan sumber tenaga, program penurunan karbon dioksida terhadap industri dan program lainnya. Walaupun demikian, disisi Jepang yang merasa

² Harutoshi, F. (1992). *Environmental Problems in Postwar Japanese Society*. International Journal of Japanese Sociology., Hal 3

dirugikan oleh keikutsertaannya dalam Protokol Kyoto, sebenarnya Jepang juga diuntungkan dengan adanya beberapa hal yang mampu mendorong kemajuan ekonomi Jepang, yaitu mempererat hubungan diplomatis Jepang dengan negara-negara maju maupun berkembang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dilema merupakan situasi sulit yg mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yg sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi yg sulit dan membingungkan.³ Dari pengertian dilema tersebut, dapat dikatakan bahwa situasi yang Jepang alami adalah sebuah dilema, karena Jepang harus mengambil pilihan dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi ketika Jepang berkomitmen pada Protokol Kyoto.

Dalam bab ini, penulis akan menjawab hal-hal apa saja yang dihadapi Jepang yang sebagai negara Industri dilema dalam penanganan isu perubahan iklim global (Protokol Kyoto), diantaranya sebagai berikut:

4.1 PERIODE PROTOKOL KYOTO KOMITMEN I

A. Adanya Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

- Sistem Politik Jepang

Membicarakan sistem politik suatu negara, berarti membicarakan interaksi aktif yang erat antara komponen suprastruktur politik, sehingga membuat suasana kehidupan kenegaraan yang harmonis dalam menentukan kebijakan umum dan menetapkan keputusan politik. Dalam hal ini, masyarakat yang tercermin dalam

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*" Diakses pada 26 Agustus 2015, dari <http://kbbi.web.id>.

komponen-komponen infrastruktur politik berfungsi sebagai masukan (*input*) yang berwujud pernyataan kehendak dan tuntutan masyarakat (*social demand*), sedangkan suprastruktur politik (pemerintah dalam arti luas) berfungsi sebagai output dalam hal menentukan kebijakan umum (*public policy*) yang berwujud keputusan-keputusan politik (*political decision*).

Jepang sebagai salah satu negara demokrasi juga mempunyai struktur ketatanegaraan sebagaimana tersebut di awal, yang meliputi suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Suprastruktur politik, meliputi lembaga-lembaga kenegaraan atau Lembaga-lembaga Negara atau alat-alat Perlengkap Negara. Dengan demikian, suprastruktur politik Negara Jepang, meliputi :

- a. Lembaga Legislatif, yaitu *National Diet* (Parlemen Nasional)
- b. Lembaga Eksekutif, yaitu *Cabinet* (Dewan Menteri), yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
- c. Lembaga Judisial, yaitu *Supreme Court* (Mahkamah Agung).

Sedangkan Infrastruktur politik meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang dalam aktivitasnya mempengaruhi (baik secara langsung maupun tidak langsung) lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

Infrastruktur ini terdiri dari:

- 1) Partai politik (*political party*)
- 2) Golongan kepentingan (*interest group*):
 - a. Interest group asosiasi

- b. Interest group institusional
 - c. Interest group non asosiasi
 - d. Interest group yang anomik
- 3) Golongan penekan (*pressure group*)
 - 4) Alat komunikasi politik (*media political communication*)
 - 5) Tokoh politik (*political figure*)

Jepang sebagai suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi, tidak dapat mengabaikan hidup dan berkembangnya partai politik, dengan kata lain Jepang merupakan negara demokrasi yang salah satu cirinya adalah adanya partai politik. Sampai saat ini, Jepang menganut sistem politik *multi party* (banyak partai), yaitu ada enam partai besar :

1. *Liberal Democratic Party*,
2. *The Japan Socialist Party*,
3. *The Komneito (Clean Government Party)*,.
4. *The Democratic Socialist Party*,
5. *The Japan Communist Party*,
6. *The United Social Democratic Party*,

Sejak pasca Perang Dunia Kedua sampai sekarang ini, Partai Demokrasi Liberal (LDP) secara mayoritas berkuasa di Jepang. Perdana Menteri Jepang saat ini juga berasal dari Partai LDP, di samping itu banyak para anggota LDP yang duduk di Cabinet dan National Diet.

Kehidupan partai politik Jepang sangat dipengaruhi oleh apa yang dinamakan *hubatsu* atau faksi yang merupakan bagian (sub-bagian) dari partai

politik di Jepang. Misalnya lima faksi yang ada dalam tubuh LDP, meliputi Faksi Takhesita, Faksi Matzuzuka, Faksi Komoto. Faksi-faksi yang merupakan bagian (sub bagian) dari partai politik ini sangat berperan dalam pemilihan ketua partai (LDP) dan ketua partai akan ditunjuk oleh DIET sebagai Perdana Menteri, yang kemudian diangkat/dilantik oleh Kaisar. Keadaan partai politik Jepang memang mempunyai karakteristik yang unik, yang berbeda dengan sistem kepartaian di negara industri lainnya seperti Amerika. Keberadaan partai konservatif (LDP) tidak berdasarkan keanggotaan organisasi dalam partai tetapi berdasarkan koalisi faksi-faksi (*habatsu*).

Golongan kepentingan (*interest group*) di Jepang adalah kelompok perusahaan-perusahaan besar Jepang atau kelompok *Big Business*. Ada empat asosiasi bisnis (*business associations*) khusus utama di Jepang, yaitu Keidanren (*Federation of Economic Organizations*), Nisho (*Japan Chamber of Commerce and Industry*), Keizai Doyukai (*Japan Committee for Economic Development*), dan Nikkeiren (*Federation of Employers Organization*). Di samping itu terdapat pula organisasi perusahaan swasta (yang bersifat prihat), yaitu Keiretsuka (semacam perusahaan yang mempunyai anak-anak perusahaan pembuat komponen), misalnya Mitsui group atau Mitshubishi group.

Organisasi/asosiasi-asosiasi tersebut dapat dimasukkan sebagai interest asosiasi, yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan di bidang bisnis dan industri Jepang. Karena situasi dan kondisi politik di Jepang, maka *interest group* bisa berubah menjadi *pressure group* (golongan penekan), yaitu golongan yang bisa memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Sehingga kelompok *Big*

Bussines dapat disebut sebagai golongan penekan, sebab kelompok tersebut (infrastruktur politik) dalam pelaksanaan sistem politik Jepang dapat mempengaruhi suprastruktur politik (khususnya pemerintah/eksekutif/cabinet) dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.

Tokoh-tokoh politik (*political figure*) Jepang yang mempunyai peran penting ialah mereka yang tergabung dalam partai politik, khususnya melalui faksi masing-masing. Di samping itu juga mereka dalam big business. Tokoh-tokoh politik yang berkecimpung dalam salah satu partai politik tertentu dapat pula mengadakan hubungan dengan negara lain (antar partai), lebih-lebih pada negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Jepang.

Dalam kaitannya dengan diplomasi kebudayaan, ada organisasi yang dilibatkan, yaitu *Japan Foundation* yang didirikan pada tahun 1972 sebagai pembantu menteri luar negeri. Lembaga ini mengurus masalah tukar menukar artis, sarjana, organisasi dosen, dan misi-misi kebudayaan lainnya.⁴

Satu komponen Infrastruktur politik, yang sangat penting sekali dalam sistem politik Jepang yaitu Media Komunikasi Politik (*Media Political Communication*). Media ini meliputi media cetak (majalah dan koran) dan media siaran (radio dan televisi).

Media cetak merupakan media yang mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan Jepang, dengan media cetak inilah dapat dikomunikasikan pendapat para pakar, para tokoh politik, dan pendapat para anggota masyarakat lainnya, yang pendapatnya/gagasannya tidak bisa/belum tersalurkan lewat faksi

⁴ Yanti, I. (2014). *Diplomasi kebudayaan jepang di Indonesia melalui The Japan Foundation tahun 2003-2011*. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 1

maupun partai. Di samping itu, melalui media cetak juga bisa pula digunakan untuk mengkomunikasikan kejelekan-kejelekan para tokoh politik lantaran suatu skandal sex/korupsi/suap. Melalui media cetak ini pulalah, program partai/faksi/pemerintah/organisasi masyarakat dan kejadian-kejadian dalam negeri maupun luar negeri dikomunikasikan kepada masyarakat. Informasi-informasi yang berasal dari media-media tersebut merupakan input/masukan yang penting dalam pembuatan kebijakan Jepang.

- Hubungan antara *Pressure Group* dengan Kebijakan Jepang Terhadap Protokol Kyoto

Dalam hal ini, jika disangkutpautkan hubungan antara dilema yang terjadi oleh Jepang dalam penanganan isu perubahan iklim dengan sistem politik yang Jepang terapkan, dapat dikatakan bahwa kebijakan maupun keputusan yang Jepang ambil dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, yang dimana pemerintah harus melalui proses pembuatan kebijakan.

Dalam permasalahan Protokol Kyoto, dimana jika Jepang turut serta dalam komitmennya yakni harus mengurangi emisi gas karbon sebanyak 6% dirasa sulit bagi Jepang karena adanya tekanan-tekanan dari dalam negeri/domestik Jepang METI (*Ministry of Economy, Trade and Industry*) maupun oleh para kelompok penekan yakni dari perusahaan-perusahaan industri Jepang. Lingkungan dan politik di Jepang memiliki ketergantungan yang cukup besar khususnya dalam membuat sebuah kebijakan yang ramah lingkungan. Hal tersebut berdasarkan kepentingan pemerintahan Jepang terhadap masalah ekonomi. Di dalam

pemerintahan Jepang terdapat perdebatan mengenai peningkatan industrialisasi yang berdampak terhadap emisi GRK yang menyebar di atmosfer kemudian berdampak terhadap lingkungan atau fokus terhadap lingkungan yang belum tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Jepang. Jepang mengalami dilema yang cukup besar saat ini. Langkah Jepang dalam keikutsertaannya dalam Protokol Kyoto Komitmen I hanya terlihat sebagai upaya “pencitraan” Jepang dalam pergaulannya dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan Jepang dalam pembahasan awal target pengurangan emisi, menentang upaya pengurangan emisi karena METI dalam pernyataan yang disampaikan oleh Jun Arima, salah satu pejabat perdagangan ekonomi dan departemen industri tersebut, menyampaikan bahwa Jepang menolak keras protokol yang dianggap menjadi salah satu penghasil emisi pada gas rumah kaca dan Jepang tidak akan patuh lagi pada Protokol Kyoto.⁵ Hal itu dilakukan karena Jepang berusaha melindungi industri domestik dan MNCs (*Multinational Corporations*) Jepang yang ada di beberapa negara di Asia.

Jepang diawal menolak pengurangan emisi atas dasar MITI (Sekarang METI) yang menentang kemudian mengambil keputusan kembali untuk berkomitmen pada Protokol Kyoto Komitmen I. Hingga usai Protokol Kyoto Komitmen I, Jepang gagal dalam pencapaian targetnya, dan memutuskan untuk tidak berkomitmen penuh pada Protokol Kyoto Komitmen II. Dalam pendekatan ekologi politik, tidak berkomitmennya Jepang dalam Protokol kyoto ini karena faktor politik dan ekonomi.

⁵ Choirul. (2010, Desember 02). *Pemanasan Global, Jepang Tolak Protokol Kyoto* . Diakses pada 29 Juli 2015, dari Dunia: <http://dunia.tempo.co>

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa dilema yang Jepang alami pada saat pengambilan keputusan untuk berkomitmen pada Protokol Kyoto adalah karena adanya tekanan-tekanan dalam negeri yang membuat Jepang untuk melindungi industri-industrinya dari pengurangan emisi dimana hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Jepang sendiri, akan tetapi keikutsertaan Jepang dalam Protokol Kyoto juga penting bagi Jepang karena dengan ikut berkomitmen Jepang dapat mempererat hubungan diplomatis dengan negara-negara maju maupun berkembang yang juga ikut berpartisipasi dalam Protokol Kyoto, sehingga Jepang pun bisa membuka lebar sayapnya dalam pasar internasional.

B. Kebijakan Politik Hijau (*Green Politic*) Jepang

- Munculnya Teori *Green Politics*

Keberadaan *critical theory* sebagai teori alternatif yang muncul dalam studi Hubungan Internasional telah memberikan begitu banyak peranan terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional. Aspek-aspek yang berada di luar peperangan, kedaulatan, interest, maupun power mulai terangkat menjadi pembahasan-pembahasan dalam studi Hubungan Internasional setelah berkembangnya *critical theory*. Contohnya saja seperti aspek lingkungan.

Perspektif *environmental* didasari oleh adanya *green movement*, yaitu kesadaran bahwa perkembangan peradaban manusia memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Pemikiran ini berasal dari fakta yang ada di masyarakat, yaitu banyaknya krisis lingkungan seperti pemanasan global, deforestasi, dan limbah

nuklir. Para penganut *environmentalism* menolak nilai-nilai *antropocentrism* yang telah menjadi mainstream dalam masyarakat. *Antropocentrism* merupakan pemikiran manusia yang hanya berpusat pada manusia saja. Mereka ingin mengubah mainstream *antropocentrism* tersebut menuju kepada *ecocentrism* dimana pemikiran tersebut menempatkan nilai independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup.⁶

Keinginan untuk mengubah mainstream tersebut didorong dengan adanya fakta bahwa *antropocentrism* yang ada pada masyarakat menyebabkan perkembangan peradaban manusia seperti dalam teknologi, ekonomi dan militer sering kali mengabaikan faktor lingkungan. Contohnya di negara periphery, industrialisasi sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan, karena sistem ekonomi yang ada menyebabkan manusia berorientasi kepada keuntungan manusia saja. Pemikiran tersebutlah yang ingin diubah oleh para penganut *environmentalism* karena mereka menganggap bahwa manusia dan lingkungan bukanlah hal yang dapat dipisahkan.⁷

Matthew Patterson mengatakan bahwa terdapat perbedaan mengenai *environmentalism* dengan *green politics*.⁸ Perbedaan secara umum adalah bahwa para *environmentalist* menerima struktur yang ada, oleh karena itu perhatian terhadap isu-isu lingkungan dapat diberikan melalui struktur yang ada. Pendekatan yang digunakan oleh *environmentalist* adalah pendekatan liberal institusional, yaitu percaya bahwa institusi internasional dapat memberikan solusi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi. Bentuk konkret dari kebijakan

⁶ Linklater, S. B. (2011). Teori-Teori Hubungan Internasional. Bandung: Nusa Media. Hal 277

⁷ Ibid

⁸ Ibid

institusi antara lain adalah Protokol Kyoto dan UNFCCC. Sedangkan *green politics* menurut Patterson memiliki pandangan yang lebih skeptis mengenai struktur yang ada, terutama terhadap *state-system* dan *sovereignty* dapat memberikan solusi terhadap masalah lingkungan. Patterson mencontohkan pemikir *green politics* menginginkan adanya desentralisasi, yaitu masyarakat bertanggung jawab terhadap lingkungannya sendiri. Cara ini dianggap lebih efektif dibandingkan kebijakan *top-down* oleh negara. Sejalan dengan perkembangannya, pemikiran mengenai desentralisasi ini berkembang menjadi bentuk yang lebih radikal, yaitu menolak adanya *state-system* karena selama ini lingkup negara terlalu besar, sedangkan kemampuan negara terlalu kecil dalam melakukan koordinasi. Pemikiran desentralisasi dalam bentuk sederhananya dapat diungkapkan dengan istilah '*think globally, act locally*' yang memiliki arti berpikir secara global berarti menyebarkan pemikiran mengenai lingkungan dan kemudian melakukan aksi konkret pada lingkungannya.

Struktur yang diinginkan oleh para penganut *green politics* hingga saat ini memang belum sepenuhnya terwujud. Namun, kemunculan rezim lingkungan seperti Protokol Kyoto dan UNFCCC telah membuktikan bahwa saat ini kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya keberlangsungan lingkungan semakin meningkat. Sebanyak apapun kekayaan alam, seberapa besarpun power dan secanggih apaapun teknologi yang dimiliki oleh suatu negara, pada akhirnya suatu negara tetap membutuhkan lingkungan/wilayah untuk keberlangsungan dan keberadaan negaranya tersebut.

- Kebijakan Jepang Berdasarkan Teori *Green Politics* dalam Berkomitmen Pada Protokol Kyoto

Sejak tahun 1970an Jepang ditandai sebagai “pesaing global baru” (*new global competitor*) dengan berbagai merek dagang ternama, diantaranya seperti Suntory Ltd, Toyota Motor, Matsushita Electric, Honda, Sony, Hitachi, Yamato, Fuji Photo, Mitsui, Mitsubishi dan dalam dunia konstruksi ada Obayashi Gumi, memasuki pasar diawali di Asia Timur, Eropa dan Amerika. Dalam bisnis perbankan, Bank of Tokyo, Fuji Bank, dan berbagai merek baru sejak 1980an.⁹

Namun periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1960-an tidak disertai dengan pengendalian masalah lingkungan yang baik. Hal ini mengakibatkan peningkatan dan konsentrasi pencemaran lingkungan di beberapa wilayah. Kawasan petrokimia yang diperluas dengan mereklamasi tanah dan laut di Jepang menyebabkan bertambahnya cerobong penghasil asap tebal yang mengakibatkan polusi udara dan air buangan dari berbagai pabrik mengalir ke sungai serta danau yang menyebabkan kesehatan warga terganggu. Kebijakan yang diambil dalam rangka menanggulangi masalah ini adalah mengeluarkan undang-undang *Basic Law for Environmental Pollution Control* pada tahun 1967 dengan tujuan melakukan tindakan pengendalian yang komprehensif dan sistematis terhadap pencemaran yang terjadi.¹⁰ Dengan disetujuinya 14 rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran pada bulan Desember 1970 oleh Diet, diharapkan penataan lingkungan akan lebih baik di Jepang.

⁹ Sarah, I. P. (2013). *Perubahan Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Protokol Kyoto*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional. Hal 4

¹⁰ Cheever, F. (9 September 2013). *Environmental law*. Diakses pada 30 Juli 2015, dari Encyclopedia Britannica: <http://www.britannica.com>

Seiring pertambahan waktu, tidak hanya Jepang negara maju yang diketahui memiliki gas rumah kaca dalam skala besar, namun sejumlah negara lainnya yang tergabung dalam Annex 1. Penelitian pun menunjukkan data akibat pemanasan global yang dirasakan saat ini yang akan berdampak lebih buruk dalam waktu depan jika tidak diambil tindakan serius. Jepang yang pada saat itu sebagai tuan rumah CoP3 tempat Protokol Kyoto dicetuskan merasa bangga dapat bergabung dan menyerukan masyarakat Jepang serta masyarakat dunia untuk menyadari bahaya pemanasan global. Dalam kesempatan yang sama pula menteri lingkungan Jepang Hiroshi Ohki menyampaikan langkah-langkah yang akan ditempuh Jepang yang selanjutnya disebut dengan “Prestasi Protokol Kyoto” sebagai tindakan menyelamatkan bumi dari bahaya pemanasan global.

Akan tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan realita yang ada saat ini, dimana Jepang masih sepenuhnya fokus pada pengembangan industrialisasinya demi kepentingan pertumbuhan ekonomi negara tanpa lebih fokus pada penanganan dampak lingkungan yang terjadi. Hal tersebut dibuktikan dari bertambahnya emisi gas buang industri Jepang dari tahun ke tahun seperti yang dijelaskan di bab-bab sebelumnya, sehingga akhirnya Jepang tidak mampu memenuhi pengurangan target emisi yang telah ditetapkan pada Protokol Kyoto. Meningkatnya emisi tersebut membuktikan bahwa semakin berkurangnya fokus Jepang terhadap pengendalian masalah lingkungan ini.

Merujuk pada pernyataan Bryant pada bab I, bahwa asumsi pokok ekologi politik ialah perubahan lingkungan tidak bersifat netral, tetapi merupakan suatu

bentuk politik lingkungan yang banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Jepang dalam pengambilan keputusannya pada Protokol Kyoto merupakan bentuk politik lingkungan Jepang semata, dan dari perspektif Hempel yang menjelaskan bahwa politik hijau adalah mempelajari saling-ketergantungan (*interdependence*) antara unit politik dan saling keterkaitan (*inter-relationship*) antar unit politik dengan lingkungan hidupnya, terutama yang berkenaan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan, Jepang pun paham bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebuah pilihan yang rasional dan pasti akan ada konsekuensinya, dimana Jepang memilih untuk memajukan pembangunan negaranya dan pada saat yang sama pula memunculkan dampak/masalah lingkungan di dalam negeri sendiri.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa dilema yang Jepang alami saat itu adalah bagaimana Jepang bisa berkomitmen penuh pada Protokol Kyoto jika Jepang masih fokus pada pembangunan negara yang tentunya Jepang harus bisa menangani permasalahan akibat dampak dari pembangunan di dalam negeri.

4.2 PERIODE PROTOKOL KYOTO KOMITMEN II

A. Kendala Biaya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Jepang

Kondisi ekonomi Jepang yang mengalami stagnasi ekonomi yang sudah terjadi mulai tahun 1990an membuat Jepang harus berpikir ulang dalam menjaga pertumbuhan ekonomi negaranya. Hal tersebut diperparah dengan tragedi tsunami

Jepang yang memperparah ekonomi Jepang khususnya di sektor usaha kecil menengah yang selama ini membantu perekonomian Jepang. Produk domestik bruto tumbuh 0,6% pada periode April-Juni, berdasarkan statistik yang dikeluarkan pemerintah, sehingga mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 2,6%. Pertumbuhan tahunan itu lebih rendah dari 4,1% yang tercermin pada pertumbuhan kuartal pertama 2013. Juga lebih kecil dari perkiraan analisis sebesar 3,6%.¹¹ Stagnasi ekonomi ini berlangsung cukup lama dan mengganggu perekonomian Jepang. Dalam usahanya untuk mempercepat perkembangan ekonomi, maka Jepang berusaha untuk melaksanakan perubahan-perubahan besar dalam sektor ekonomi dengan memperluas dan meningkatkan pengembangan industri sebagai pemasukan ekonomi negara terbesar.

Dengan upaya Jepang tersebutlah yang membuat Jepang berpikir ulang dalam penanganan masalah perubahan iklim pada Protokol Kyoto, dimana biaya penanganan masalah tersebut tidaklah sedikit, mengingat begitu banyaknya perusahaan-perusahaan industri Jepang di dalam maupun luar negeri. Hal itu dibuktikan oleh sebuah research yang menyatakan bahwa target penurunan emisi GRK hingga 6 % menjadi sebuah beban berat yang mempengaruhi kebijakan Jepang, dikarenakan berkomitmen dalam masalah lingkungan akan mengorbankan sebagian kepentingan ekonomi jangka panjang, sebab untuk melaksanakan target penurunan emisi secara otomatis memerlukan program pembaharuan sumber tenaga, program penurunan karbon dioksida terhadap industri serta penggantian bahan bakar. Jepang pun pernah menyebutkan telah

¹¹ BBC Indonesia. (17 September 2012). *Ekonomi Jepang tumbuh lebih lambat dari perkiraan*. Diakses pada 27 Juli 2015, dari BBC Indonesia: <http://www.bbc.co.uk>

melakukan 986 proyek di 110 negara, dan Jepang mengeluarkan 1,5550 juta dollar untuk Afrika, 900 juta dollar untuk negara berkembang dan 230 juta untuk negara kepulauan kecil, namun pada akhirnya dana tersebut semakin menurun dari tahun ke tahun karena dialokasikan pada keperluan yang lebih diprioritaskan pemerintah Jepang.¹² Pada pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Jepang memiliki prioritas lain dibandingkan dengan penanganan masalah lingkungan yang telah ditimbulkan oleh industrinya.

Bagi negara maju, pertimbangan jangka pendek melalui pola produksi dan konsumsi merupakan hal yang lebih diutamakan, yakni penggunaan GNP per kapita sebagai indikator sukses sebuah negara dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal tersebutlah yang mendorong negara-negara maju termasuk Jepang terus meningkatkan industrialisasi di dalam maupun luar negeri. Bagi Jepang sebagai negara maju dan pengekspor barang produk industri, implikasi dari pengurangan emisi berupa penurunan konsumsi energi dapat berarti pengurangan pendapatan ekspor, sehingga pengurangan emisi dapat mempengaruhi sektor industri Jepang, dimana Jepang sangat mengutamakan perkembangan industrinya.

B. Kegagalan Jepang pada Protokol Kyoto Komitmen I

Pada 12 April 2013 laporan yang dirilis oleh kementerian lingkungan Jepang, mengatakan bahwa Jepang gagal memenuhi kewajiban menurunkan emisi sebanyak 6%. Meskipun telah melakukan upaya-upaya dalam mencapai target

¹² Sarah, I. P. (2013). *Perubahan Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Protokol Kyoto*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional. Hal 7

tersebut, kenyataannya emisi Jepang masih berada 6% diatas tahun 1990. Meskipun terdapat penurunan emisi pada masa berlakunya Protokol Kyoto Komitmen I, namun penurunan tersebut belum mencapai 6%.

Jika Jepang tidak mampu memenuhi target penurunan emisinya maka sesuai dengan pasal 3 dan 7.4, konsekuensinya adalah:

1. Pengurangan batas maksimal emisi sebesar 1,3 kali kelebihan emisi
2. Diwajibkan menyusun rencana tentang cara melakukan penurunan emisi.

Jepang sebagai pihak yang gagal memenuhi target Protokol Kyoto komitmen I (lihat tabel pada gambar 4.1) tentu akan dikenai sanksi tersebut. Namun, dengan kebijakan Jepang untuk tidak berkomitmen pada Protokol Kyoto komitmen II Jepang tidak akan mendapat sanksi diatas. Jepang menyatakan akan tetap berupaya menurunkan tingkat emisinya meskipun tidak berkomitmen pada Protokol Kyoto II, sebaliknya Jepang akan menurunkan emisinya dengan prinsip sukarela.

Gambar 4.1 World Rank Emissions

| Rank (prev yr) | Country | 1990 mt CO2 | 2010 mt CO2 | 2011 mt CO2 | % Change 1990- 2011 | RES investment needed (bln euro) |
|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|
| | World | 22,682 | 33,158 | 33,992 | +50 | 543.9 |
| 1 (1) | China | 2,452 | 8,333 | 8,876 | +262 | 142.0 |
| 2 (2) | U.S. | 5,461 | 6,145 | 6,027 | +10 | 96.4 |
| 3 (3) | India | 626 | 1,708 | 1,787 | +185 | 28.6 |
| 4 (4) | Russia | 2,369 | 1,700 | 1,674 | -29 | 26.8 |
| 5 (5) | Japan | 1,179 | 1,308 | 1,311 | +11 | 21.0 |

| | | | | | | |
|--------|--------------|-------|-----|-----|------|------|
| 6 (6) | Germany | 1,029 | 828 | 804 | -22 | 12.9 |
| 7 (7) | S. Korea | 257 | 716 | 739 | +187 | 11.8 |
| 8 (8) | Canada | 485 | 605 | 628 | +30 | 10.1 |
| 9 (9) | Saudi Arabia | 242 | 563 | 609 | +152 | 9.7 |
| 10(10) | Iran | 199 | 558 | 598 | +201 | 9.6 |

Sources: IWR Research, BP Statistical Review, German Economy Ministry , 2011

Kegagalan Jepang inilah yang menurunkan kepercayaan diri Jepang dalam berkomitmen kembali pada Protokol Kyoto Komitmen II. Selain karena alasan ketidakikutsertaan Amerika dalam berkomitmen pada Protokol Kyoto dan ketidakadilan yang dirasakan Jepang terhadap China yang merupakan negara penghasil emisi terbesar di dunia dalam pengurangan emisi, Jepang pun mengoreksi diri dalam menetapkan target pengurangan emisinya. Evaluasi Jepang terhadap pencapaian target emisi tersebut dikenal dengan Kebijakan Iklim Mamizu (*Mamizu Climate Policies*).

Pada evaluasi kebijakan iklim mamizu itu dijelaskan bahwa Jepang harus berpikir matang dalam menentukan target pengurangan emisi sesuai dengan Identitas Kaya (*Kaya Identity*) yang merupakan persamaan untuk menghitung total karbon dioksida yang disebabkan oleh manusia atau negara tertentu dengan menghitung produk populasi, GDP per kapita, penggunaan energy per unit GDP, dan emisi karbon per unit energy yang dikonsumsi.¹³

¹³ The "Kaya Identity". (n.d.). Diakses pada 1 Agustus 2015, dari METEO 469 Course Outline: <https://www.e-education.psu.edu>

Formula Kaya identity:

$$F = P \times \frac{G}{P} \times \frac{E}{G} \times \frac{F}{E}$$

dimana:

F = Emisi CO2 dari manusia

P = Populasi

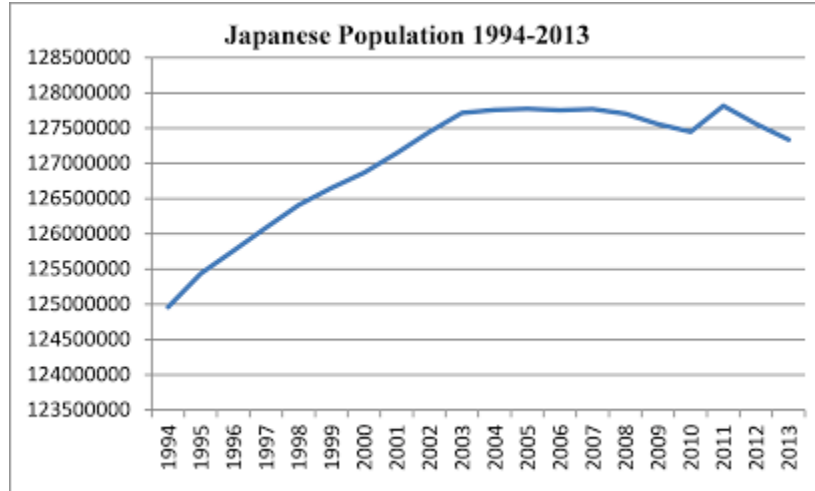
G = GDP per kapita

E = intensitas energy

Dalam Identitas Kaya menjelaskan bahwa kegagalan Jepang pada pencapaian target penurunan emisi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: pertumbuhan ekonomi (GDP) dan perubahan teknologi (emisi CO2 per unit GDP), dimana pertumbuhan GDP dipengaruhi oleh perubahan populasi dan GDP per kapita, sedangkan emisi CO2 diwakili oleh produk intensitas energi, yang mengacu pada energi per unit GDP dan intensitas karbon yang mengacu pada jumlah karbon per unit energy.¹⁴ Jadi menurut logika ini, emisi karbon terakumulasi di atmosfer hanya dapat dikurangi dengan mengurangi Populasi, GDP per kapita, atau Intensitas ekonomi karbon.

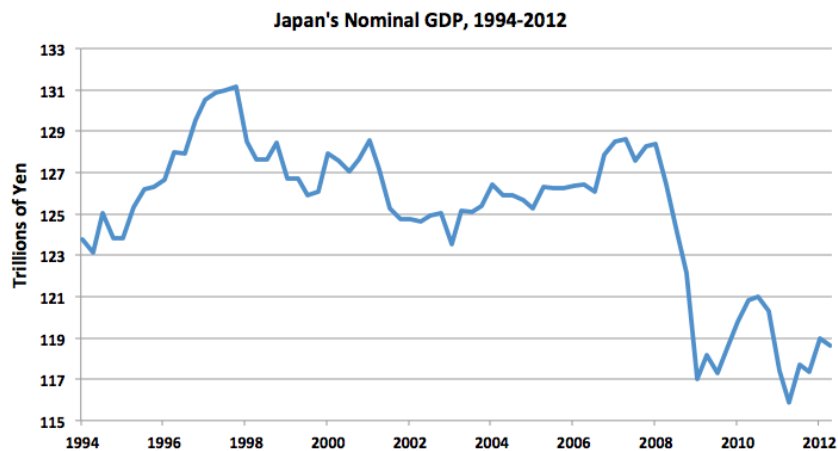
¹⁴ Ibid

Grafik 4.1 Grafik Pertumbuhan Pupulasi di Jepang 1994-2013



Sumber: <http://howisjapan.com>

Grafik 4.2 Grafik Pertumbuhan GDP Jepang 1994-2012



Sumber: www.theatlantic.com

Berdasarkan pada grafik 4.1 dan 4.2, jumlah populasi di Jepang terus meningkat sedangkan pertumbuhan GDP kadang naik dan turun. Akan tetapi, kembali pada logika dari identitas Kaya bahwa ketika jumlah populasi dan GDP meningkat, hal tersebut menandakan bahwa emisi karbon pun ikut meningkat. Jadi kegagalan Jepang pada

Protokol Kyoto komitmen I dapat dilihat dari pertumbuhan populasi masyarakat dan pertumbuhan GDP pada tahun 2007-2012.

Hal inilah yang membuat Jepang dilema dalam berkomitmen kembali pada Protokol Kyoto komitmen II. Dimana Jepang masih harus memikirkan kembali target penurunan emisi yang akan dicapai tanpa harus merugikan/mengurangi pendapatan/pemasukan bagi ekonomi Jepang yang didukung oleh perkembangan industri-industrinya.